

## BAB IV

# TINJAUAN ISLAM TERHADAP ABRI SEBAGAI KEKUATAN SOSIALPOLITIK POLITIK

### A. Diskriptif Peran Sosol Politik ABRI di Indonesia

Sebelum membahas lebih lanjut tentang peran ABRI sebagai kekuatan sosial politik, maka perlu kita ketahui berbagai penafsiran tentang fungsi sosial politik tersebut. Hal ini dikarenakan diantara para pengamat terjadi perbedaan pandangan tentang fungsi ABRI sebagai kekuatan sospol. Sebagai contoh, ensiklopedi yang terbit tahun 1988 yang disusun oleh A. Heuken S.J., Yulia Gunawan, Herman Edison Sinaga dan Ariesto Hadi yang berjudul *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila* yang diterbitkan oleh yayasan Cipta Eka Karya edisi 6 Jakarta. Didalamnya membahas dwifungsi ABRI (fungsi sosial politik) pada halaman 185 merumuskan pengertian dwifungsi ABRI sebagai penugasan tentara yang masih aktif dalam tugas non militer, khususnya dalam lembaga-lembaga pemerintahan baik yang legislatif (DPR dan MPR) maupun yang eksekutif (dari lurah sampai menteri). Jadi menurut penyusun Ensiklopedi ini Dwifungsi ABRI hanya menjelma dalam diri para karyawan ABRI saja. Kemudian pada halaman 259 ditulis bahwa baik mengenai arti, maupun mengenai lamanya serta volume Dwifungsi ABRI dapat pandangan yang

berbeda-beda dalam masyarakat. Ada yang berpendapat, bahwa Dwifungsi ABRI adalah semata-mata akibat ketidakmampuan dan kelambanan administrasi sipil, suatu tug.mt7

yang seakan-akan dipaksakan oleh situasi kepada ABRI. Yang lain berpendapat, bahwa Dwifungsi ABRI tetap diperlukan, karena ABRI bertugas dan wajib mengamankan Pancasila sebagai idiologi negara. Selanjutnya pada halaman 259 diuraikan bahwa ada yang menganggap Dwifungsi ABRI sebagai tugas sementara sampai kekuatan masyarakat mampu memainkan peranan mereka dalam demokrasi Pancasila, sedang orang lain memandangnya sebagai suatu unsur integral dari politik Indonesia. (Soebijono Cs., 1995; 57-58)

Namun bila kita lihat dari Undang-undang Nomor 2 tahun 1988 dalam pasal 6 dikatakan bahwa Prajurit ABRI mengemban Dwifungsi ABRI yaitu sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan sebagai kekuatan sosial politik. Dalam penjelasan pasalnya diterangkan bahwa prajurit ABRI dalam bidang sosial politik bertindak selaku dinamisator dan stabilisator yang bersama-sama dengan kekuatan sosial politik lainnya bertugas mensukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian prajurit ABRI berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai

masalah kenegaraan dan pemerintahan serta mengembangkan demokrasi Pancasila dan kehidupan konstitusional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Ibid. Hal. 105)

Bila kita lihat dari penjelasan dari pasal diatas peran sosial politik ABRI di Indonesia mencakup segala bidang, baik dalam bidang politik, sosial maupun ekonomi. Hal ini dapat kita lihat dari apa yang dilaksanakan selama ini seperti ABRI Masuk Desa (AMD), dibidang sosial, pendirian koperasi-koperasi milik angkatan bersenjata dibidang ekonomi disamping kekaryaan yang dilakukan dalam bidang eksekutif dan perwakilan di legislatif (DPR dan MPR)

Kalau kita lihat pada masa Orde Baru ini maka peran sosial politik yang dilakukan oleh ABRI bukan hal yang aneh, karena sejak perang kemerdekaan pun ABRI sudah banyak berperan dalam bidang politik dan bukan alat sipil semata. Sebagai contoh pada saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948.

Pada masa pembangunan ini sumbangan militer juga tidak sedikit terhadap keberhasilan pembangunan bangsa ini. Hal ini dapat kita lihat dari peranan TNI/ABRI yang telah menghasilkan stabilitas nasional yang dapat dijadikan wahana untuk melancarkan pembangunan.

Namun demikian disadari bahwa masih banyak kekurangan disana sini hal ini dengan banyaknya kritik,

himbauan dan juga kecenderungan adanya praktek "conditioning from below" untuk mengakhiri peran sospol ABRI dan hal ini oleh pimpinan ABRI ditanggapi dengan baik dengan merubah perannya dari "ing ngarso" menjadi "tut wuri".( Soemitro, 1996; 72) dan bahkan mungkin akan hapus peran sosial ABRI sebagaimana dikatakan oleh Ali Moertopo.

Tetapi peran ABRI sebagai stabilisator dan dinamisator sangat menunjang keberhasilan pembangunan, karena stabilitas politik merupakan prasyarat utama pembangunan dan peran dinamisator juga ikut andil dalam pembangunan hal ini terbukti konsep-konsep pembangunan ekonomi yang merupakan hasil pemikiran ABRI dan para pemikir non ABRI (sipil).

#### B. Tinjauan Islam Terhadap Peran ABRI Sebagai Kekuatan Sosial Politik

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa militer Indonesia (ABRI) disamping mempunyai peran sebagai kekuatan pertahanan keamanan juga sebagai kekuatan sosial politik, dalam hal ini ABRI juga bertanggung jawab atas tercapainya tujuan yang diperjuangkan seluruh rakyat Indonesia.

Bila ditinjau dari sudut pandang Islam peran ABRI sebagai kekuatan sosial politik ini maka belum ada aturan dalam nash yang goth'i membolehkan, begitu juga

nash yang melarang atau membatalkan. Apabila ada (terdapat) suatu masalah yang belum ada nashnya yang mengakui atau membatalkan, maka kita mengacu pada firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 29 :

هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. (Departemen Agama, 1992; 13)*

Berdasarkan ayat diatas bila ada sesuatu yang belum ada nash yang mengakui (membolehkan) atau membatalkan maka boleh digunakan selama bermanfaat atau memberi maslahat bagi kehidupan manusia secara umum. Sebab Islam diturunkan untuk kemaslahatan ummat manusia sebagaimana firman Allah

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين

Berangkat dari sini dapat dinyatakan bahwa hukum dari suatu masalah yang belum ada dalilnya akan pengakuan terhadap masalah tersebut atau pembatalannya, maka masalah itu harus mampu merealisasikan kemaslahatan untuk ummat manusia. Artinya mampu mendatangkan keuntungan bagi mereka dan mampu menolak madlorot serta menghilangkan kesulitan dari padanya. Dan bahwasanya kemaslahatan ummat manusia itu tidak terungkap bagian-bagiannya, tidak pula terhingga individu-individunya. ( ABD. Wahab Khollaf, 1996; 126)

Dalam ayst lain Allah berfirman :

لقد ارسلنا رسلنا بالبينت وانزلنا معهم الكتاب والميزان  
ليقووا الناس بالقيسط . ٤

*Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan... (Departemen Agama, 1992; ).*

Ayat ini dapat dijadikan lambang kekuasaan politik. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa misi para rasul adalah menciptakan kondisi yang didalamnya masa rakyat akan dapat dijamin keadilan sosialnya sejalan dengan norma-norma yang telah dicanangkan Al-Qur'an yang memberikan perintah-perintah yang jelas untuk mencapai kehidupan yang benar-benar berdisiplin. Allah juga berfirman dalam ayat lain yang artinya: (Al-Qur'an Terjemahan, 1992; 519, 94)

*Orang-orang muslim ini adalah mereka yang jika Kami beri kedudukan yang kuat dimuka bumi akan mengerjakan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat kebajikan dan melarang berbuat ketidakadilan. (QS. 22; 41)*

*Kamulah masyarakat terbaik yang telah dilahirkan untuk seluruh manusia, karena kamu menyuruh mengerjakan kebajikan dan melarang mengerjakan ketidakadilan atau kemunkaran, dan kamu beriman kepada Allah. (QS. 3; 110)*

Dari sini jelas bahwasanya dalam Islam tujuan negara bukan hanya mencegah rakyat untuk saling memeras untuk melindungi kebebasan mereka dan seluruh bangsanya dari invasi asing namun juga bertujuan mengembangkan sistem keadilan sosial yang berkesinambungan

sebagaimana telah diterangkan Allah dalam Al-Qur'an.  
(Abul A'la Al Maududi, 1995; 165-166)

Islam sendiri secara tegas tidak pernah memberikan suatu batasan peranan seseorang atau lembaga (organisasi) dalam kehidupan ini. Konsep semacam ini sangat universal hingga tidak dikenal dalam Islam koloni sipil dan militer. Maka dalam hal ini tidak ada salahnya jika militer dalam hal ini ABRI (TNI) mempunyai fungsi sosial politik disamping punya fungsi hankam dan dalam prakteknya menempati pos-pos yang strategis baik dalam jabatan supra maupun infra struktur politik negara. Disini ditekankan siapa yang lebih mampu menjalankan pemerintahan, selama dia tidak membuat kerusakan bagi bangsanya. Selama hal itu tidak terjadi, maka siapapun boleh masuk didalamnya. Hal ini sebagaimana dialami oleh Rasulullah saw. yang pada masanya beliau menjabat sebagai kepala negara, panglima perang di samping sebagai utusan Allah. Pada masa Khulafaur Rasyidin pun hal itu tetap dilaksanakan seperti pada masa Abu Bakar beliau menjabat sebagai kepala negara dan juga panglima militer, pada masa Umar ibn Khattab juga demikian bahkan banyak panglima-panglima pada masa ini yang telah berhasil menguasai wilayah yang takhlukkan kemudian diangkat menjadi wali atau gubernur di wilayah tersebut. Begitu juga Utsman dan Ali juga dulunya orang-orang militer. Jadi dalam

